

KETENANGAN PIKIRAN DAN KEDAMAIAAN UNTUK KOMUNITAS LOKAL STUDI KASUS OPEN PUBLIC SPACE DI MEDAN, SUMATERA UTARA

Cut Azmah Fithri¹, Hendra A², Erna Muliana³, Soraya Masthura Hassan⁴

¹Prodi Arsitektur Universitas Malikussaleh, email: cutazmah@unimal.ac.id

²Prodi Arsitektur Universitas Malikussaleh, email: hendraaiyub@unimal.ac.id

³Prodi Arsitektur Universitas Malikussaleh, email: erna.muliana@unimal.ac.id

⁴Prodi Arsitektur Universitas Malikussaleh, email: soraya.masthura@unimal.ac.id

ABSTRAK

Kestabilan dan ketentraman masyarakat hanya tercapai bila ada pemahaman yang sama dalam norma tertentu. Kedamaian di ruang publik sangat penting untuk kelangsungan hidup bermasyarakat. Ruang publik seperti jalan, alun-alun, dan taman menciptakan bentuk yang sejalan dengan pasang surutnya pertukaran manusia. Vitalitas ruang terbuka publik ditandai dengan frekuensi penggunaan. Penggunaan di kota baik primer maupun sekunder terkait dengan aktivitas utama jaringan perkotaan yang membentuk tulang punggung pusat kota. Ruang terbuka publik merupakan bagian dari struktur perkotaan yang menjadi inti dari elemen-elemen dalam kota. Umumnya ruang publik sulit untuk dipahami tanpa dimensi sosial yang membantu memberikan konteks dan hubungan yang paling baik dipahami sebagai proses dua arah yang berkelanjutan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Makalah ini mencoba mengkaji hubungan kegiatan ruang terbuka publik di Medan yang menjadi tempat rekreasi umum bagi penduduk perkotaan yang berpenghasilan rendah, dengan menggali keunikan gerakan sosial masyarakat di ruang publik seperti yang disebut oleh urban designer berupa “street ballet”. Aktivitas di jalanan aman saat jalanan digunakan oleh masyarakat. Namun, orang-orang di jalanan adalah orang asing. Menurut teori urban design, jalan yang digunakan adalah jalan yang aman dan terbentuk dari jalinan interaksi aktivitas yang menyatu dengan arus aktivitas lain yang berkelanjutan. Kota itu sendiri sangat kompleks; Namun, kerumitan menciptakan tatanan yang diatur oleh orang asing. Keamanan di jalanan dan ruang publik adalah “ketenangan pikiran” para pengunjung dan ini akan membawa kota menjadi aman dan dikunjungi.

Kata kunci: *desain perkotaan, ruang terbuka public, safe street*

Info Artikel:

Dikirim: 27 Maret 2021; Diterima: 18 April 2021; Diterbitkan: 18 April 2021



©2021 The Author(s). Published by Arsitekno, Architecture Program, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. PENDAHULUAN

Penggunaan dan akses penuh secara individu di suatu ruang publik serta pemahaman pengguna yang berbeda-beda terhadap batasan kepemilikan ruang publik mengakibatkan terjadinya berbagai macam konflik. Salah satunya adalah isu keselamatan yang berkaitan erat dengan konflik penggunaan ruang secara berlebihan dan perilaku pengguna yang dianggap mengganggu atau tidak sopan.

Permasalahan perilaku pengguna menjadi sangat dominan di negara-negara maju, sementara konflik penggunaan yang berlebihan juga semakin meluas di wilayah lain. Di negara-negara Selatan, permasalahan tersebut seringkali terkait dengan faktor sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, kehadiran “anak jalanan” atau perdagangan informal.

Pentingnya rasa aman di antara pengguna di ruang publik tidak bisa dianggap remeh. Selain menjadi kebutuhan dasar manusia, kehilangan rasa aman dalam lingkungan sehari-hari dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif seperti perilaku dan sikap anti-sosial serta stress.

Ada beberapa teori yang membahas hubungan antara lingkungan fisik dan masalah ketidakamanan [1], [2]. Sejalan dengan beberapa studi yang telah dilakukan dengan mengenai pengaruh lingkungan fisik terhadap kejahatan dan keselamatan [3], studi lainnya lebih menitikberatkan faktor-faktor sosial, seperti solidaritas komunitas dan homogenitas, sebagai hal yang signifikan dalam menjelaskan kejahatan dan ketakutan akan kejahatan [4]. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antar kegiatan dan mengklarifikasi faktor mediasi yang mempengaruhi perasaan keselamatan dan keamanan di ruang publik.

2. KETENANGAN DAN KOMUNITAS

Jika ingin tetap mempertahankan suatu komunitas masyarakat di kota yang dapat hidup berdampingan dengan masalah-masalah sosial yang lebih kompleks maka kita harus memperkuat kekuatan apa pun yang bisa diterapkan untuk menjaga keselamatan dan peradaban yang ada di komunitas yang kita miliki. Penting untuk dipahami bahwa ketenangan publik (*public space* dan *street peace*) kota bukan merupakan tanggung jawab dari aparat keamanan [1]. Melainkan sesuatu yang rumit, dilakukan tanpa disadari dan dipaksakan oleh masyarakat itu sendiri.

Jalan-jalan kota harus memiliki tiga kualitas utama dalam menangani pengguna agar tetap aman [1]. Pertama, di jalan harus ada batasan yang jelas antara ruang publik dan ruang privat. Ruang publik dan privat tidak dapat saling melebur seperti yang biasanya terjadi di lingkungan pinggiran kota. Kedua, harus ada yang memperhatikan/mengawasi jalan. Mata yang mengawasi adalah milik mereka yang mungkin kita sebut sebagai pemilik alami jalan. Bangunan di pinggir jalan direncanakan untuk menangani orang asing yang melewati dan untuk menjamin keselamatan, baik penghuni dan orang asing tersebut, oleh karena itu bangunan harus berorientasi pada jalan. Dengan demikian, bangunan tidak boleh membelakangi jalan sehingga membuatnya tidak terawasi. Ketiga, trotoar harus digunakan secara terus menerus. Ini akan menambah jumlah mata yang mengawasi aktifitas di jalan dan mendorong orang-orang di bangunan-bangunan di sepanjang jalan untuk memperhatikan trotoar dalam jumlah yang memadai.

Selama beberapa dekade, dalam dunia desain perkotaan, sudah ada pembahasan mengenai gagasan *safe spaces*. Salah satunya dipengaruhi oleh proposisi *defensible space* yang dicetuskan oleh Oscar Newman, fokusnya adalah mengidentifikasi karakteristik tertentu dari lingkungan fisik yang, jika diterapkan dalam desain, secara otomatis akan mengarah pada penciptaan tempat yang aman bagi penggunaannya, terlepas dari konteksnya. Karakteristik seperti peningkatan tinggi bangunan adalah contoh kesalahpahaman seperti itu, yang berulang kali dikaitkan dengan kejahatan dan perasaan tidak aman, meskipun tanpa bukti empiris yang konklusif.

Determinisme fisik ini sering sekali mengabaikan peran variabel lain seperti homogenitas sosial budaya, pendapatan, rasio usia remaja - dewasa, lokasi terjadinya kejahatan, dan jenis kejahatan. Dampak dari faktor-faktor ini pada kejahatan dan ketakutan akan kejahatan terbukti lebih signifikan [5]. Kasus-kasus dimana kenaikan tinggi bangunan dikaitkan dengan kejahatan atau ketakutan akan kejahatan, yang melibatkan kondisi sosial dan fisik, yang secara bersama-sama menjelaskan efek negatif pada perilaku dan perasaan aman.

Perilaku yang bagaimana dan penggunaan lingkungan binaan seperti apa yang dianggap sebagai ancaman terhadap keselamatan, sangat ditentukan oleh faktor budaya. Tulisan dan lukisan pada dinding eksterior memiliki interpretasi budaya yang berbeda-beda sehingga apa yang dianggap grafiti yang tidak diinginkan dalam budaya tertentu justru dianggap sebagai media untuk berbagi suatu kegiatan yang menyenangkan di dalam suatu komunitas kepada orang lain. Bahkan dalam budaya yang sama, di antara kelompok sub-budaya yang berbeda adanya pemahaman yang berbeda, apa yang dilihat oleh beberapa orang sebagai ekspresi diri dianggap sebagai ketidaksopanan visual oleh orang lain.

3. TEORI RUANG PUBLIK

Sepanjang sejarah, pemahaman akan ruang publik muncul dari desakan-desakan yang berbeda. Konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi di masyarakat merupakan akibat dari interferensi mereka sendiri dan perubahan ruang yang terjadi menjadi sangat penting di daerah

perkotaan. Penyebab lainnya merupakan hasil dari masyarakat heterogen dengan berbagai kebutuhan, minat, dan apresiasi estetika. Keinginan akan perencanaan yang cermat dengan memperhatikan prioritas sebagai pedoman yang menghasilkan bentuk dan fungsi. Namun demikian, ada elemen lain yang terjadi di lokasi tanpa prosedur perencanaan yang formal. Ruang publik sebagai area terbuka yang dapat diakses oleh umum baik untuk kegiatan perorangan maupun kelompok-kelompok [6]. Meskipun ruang publik terdiri dari bentuk yang beragam dengan istilah yang berbeda seperti plaza, mal, dan taman bermain, semuanya menawarkan hal yang sama. Ruang publik juga memungkinkan orang-orang saling terhubung untuk berinteraksi satu sama lain. Ruang publik umumnya terdiri dari fasilitas umum seperti jalan setapak, bangku, dan air; elemen fisik dan visual, seperti perkerasan atau rumput, dan vegetasi yang mendukung kegiatan. Direncanakan atau tidak, mereka biasanya merupakan ruang terbuka dan dapat diakses oleh umum.

Berbagai ruang terbuka yang berfungsi sebagai ruang publik melingkupi berbagai aspek dari aktifitas manusia. Itu termasuk kenyamanan fisik yang berkaitan dengan ketenangan saat pengguna melakukan aktifitas seperti beristirahat dan duduk. Kebutuhan sosial merespon rangsangan orang lain di sekitarnya, melarikan diri dari stres perkotaan, dan perlindungan terhadap ancaman dari orang lain. Masyarakat membutuhkan suasana rileks, menikmati ketenangan yang ditawarkan oleh ruang publik dan berkesempatan menikmati unsur alam dari ruang publik tersebut yang berfungsi sebagai oasis.

Terdapat tiga nilai utama yang menjadi pedoman pengembangan ruang publik, yaitu tempat umum harus responsif, demokratis, dan bermakna [6]. Ruang responsif adalah ruang yang dirancang dan dikelola untuk melayani kebutuhan penggunanya. Ruang demokrasi melindungi hak kelompok pengguna dan dapat diakses oleh masyarakat. Dan ruang yang bermakna adalah ruang yang memungkinkan orang membuat hubungan yang kuat antara tempat, kehidupan pribadi mereka, dan dunia yang lebih luas. Namun ada lima indikator yang dapat mengukur kebutuhan orang di ruang publik yaitu kenyamanan, relaksasi, keterlibatan pasif dengan lingkungan, keterlibatan aktif dengan lingkungan, dan penemuan.

Kenyamanan adalah kebutuhan dasar, seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat untuk berteduh, atau tempat untuk beristirahat dari kepenatan, semua membutuhkan kepuasan terhadap kenyamanan tersebut. Relaksasi merupakan kenyamanan yang dinilai berdasarkan tingkat pelepasannya. Rasa nyaman secara psikologis merupakan prasyarat dari rasa relaksasi - menghilangkan ketegangan fisik, menuntun orang tersebut ke perasaan tenang. Keterlibatan pasif dengan lingkungan dapat menimbulkan perasaan rileks tetapi berbeda karena melibatkan kebutuhan untuk bertemu dengan lingkungan, meskipun tidak terlibat secara aktif. Kategori ini melingkupi minat dan kesenangan yang sering diamati orang-orang yang berasal dari melihat aktifitas yang lewat. Keterlibatan aktif mewakili pengalaman interkasi langsung dengan suatu tempat dan orang-orang di dalamnya. Penemuan adalah alasan kelima kehadiran orang di ruang publik dan mewakili keinginan untuk stimulasi dan kegembiraan yang kita semua miliki dalam pengalaman baru yang menyenangkan.

Banyak ruang publik tidak ditujukan untuk satu aktivitas tertentu atau satu grup pengguna; jalanan, misalnya, memainkan banyak peran untuk berbagai kelompok pengguna. Mereka mengakomodasi kegiatan sosial seperti waktu senggang, pesta, doa dan protes; ruang publik berfungsi sebagai pusat komunitas, tempat kerja, dan lingkungan belajar.

Pedoman berbasis penelitian untuk desain ruang publik yang baik sangat merekomendasikan kebebasan akses bagi pengguna, dan pengendalian ruang publik [6]. Selanjutnya, teori normatif untuk desain perkotaan yang baik mempromosikan atribut seperti keragaman, variasi, kompleksitas, dan *mix use* [7]. Atribut ini secara khas meningkatkan pilihan pengguna: pilihan dalam persepsi, interpretasi, dan penggunaan; "Lingkungan binaan harus menyediakan lingkungan yang pada dasarnya demokratis bagi penggunanya, memperkaya peluang mereka dengan memaksimalkan tingkat pilihan yang tersedia bagi mereka" [8]. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa ruang publik yang baik adalah ruang yang digunakan oleh beragam karakter pengguna untuk berbagai kegunaan.

4. KONSEKUENSI RUANG TERBUKA PUBLIK TERKAIT PENGGUNAAN

Ketakutan akan kejahatan lebih mengancam daripada kejahatan itu sendiri, dan mempengaruhi perilaku dan keputusan pengguna untuk menggunakan ruang tersebut atau menghindarinya. Bertentangan dengan asumsi yang disampaikan Newman, bahwa suatu tempat yang dapat dipertahankan secara fisik justru meningkatkan level pengawasan dan intervensi pencegahan kejahatan merupakan konsekuensi penting [4]. Pengawasan memainkan peran penting dalam keamanan ruang publik, namun ruang yang dapat diamati tidak selalu diamati; hanya sedikit orang yang duduk dan berjaga-jaga dari jendela mereka ketika tidak ada yang cukup menarik untuk ditonton. Oleh karena itu, masalah pentingnya adalah, kondisi fisik dan perilaku apa yang akan menopang pengamatan. Beberapa dekade yang lalu Jane Jacobs mengingatkan kita bahwa ruang publik akan lebih aman jika dikategorikan untuk perpaduan yang rumit dari berbagai kegunaan [1].

Penggunaan ruang publik merupakan faktor mediasi yang membantu menyelesaikan konflik yang muncul dalam temuan penelitian dan perdebatan tanpa akhir antara perancang dan ilmuwan sosial, seperti apakah kondisi fisik, atau kondisi sosial, yang mempengaruhi persepsi, dan aktual, keamanan. Faktor-faktor sosial ini bergantung pada kekuatan ikatan sosial dan rasa memiliki terhadap suatu tempat, juga disebut keterikatan tempat, yang dibentuk oleh penggunaan ruang bersama yang berkelanjutan.

Dalam penelitian selanjutnya, Newman memasukkan variabel sosial dan variabel independen. prediktor sosial dan manajerial. Ia menyimpulkan bahwa pengaruh variabel fisik, sosial dan prediktor fisik, sosial dan variabel independen terhadap kejahatan, ketakutan dan ketidakamanan melalui variabel mediasi yaitu penggunaan ruang, interaksi sosial dan penguasaan akan ruang [2]. Dengan kata lain, penggunaan dipandang sebagai pemicu munculnya perasaan aman; namun ini merupakan indikator bahwa orang merasa cukup aman untuk menggunakan suatu tempat. Jadi, hubungan antara penggunaan dan perasaan aman paling baik digambarkan sebagai suatu siklus. Jika keamanan tidak tercapai, terjadi penurunan siklus secara bertahap yang mengarah ke pengaturan yang terabaikan dan isolasi sosial [9].

5. RUANG TERBUKA UMUM DI MEDAN, SUMATERA UTARA KESIMPULAN DAN SARAN

Sensus terakhir menunjukkan bahwa Kota Medan berpenduduk 2,5 juta jiwa dengan kepadatan 9.522,22 jiwa/km². Kota Medan memiliki luas 26.510 ha (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatra Utara. Ruang terbuka publik yang berfungsi sebagai ruang hijau perkotaan adalah sekitar 1.287,48 ha hanya 4,8% dari total luas pusat kota. sedangkan luas yang dibutuhkan oleh penduduk adalah 30% dari luas kota yaitu sebesar 7.953 ha.

Pusat kota Medan dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah Belanda pada akhir abad ke-19 yang merupakan akhir dari masa penjajahan di Indonesia. Medan dirancang sebagai pemukiman perkotaan kolonial baru. Meskipun populasi penduduk Eropa sedikit tetapi mereka mendominasi wilayah Polonia. Belanda meletakkan pusat pemerintahannya di tengah kota, dengan Lapangan Merdeka sebagai alun-alun. Pada masa kolonial penduduk Eropa dianggap memiliki status sosial tertinggi karena mereka mendominasi departemen-departemen pemerintahan. Kawasan Polonia dirancang dengan konsep kota taman. Ruang terbuka publik bagian dalam kota terdiri dari Taman Ahmad Yani dan berfungsi sebagai amenitas perkotaan yang memenuhi semua kebutuhan mereka sesuai dengan gaya hidup mereka. Selama era kolonial taman berfungsi sebagai penghuninya untuk tujuan rekreasi.

Sejak 1998, Informalitas menjadi fenomena keseharian yang terjadi di sebagian besar ruang terbuka publik di Medan. Informalitasnya membentuk kehidupan sehari-hari dan kejadian-kejadian yang menunjang perekonomian masyarakat Medan.

Kehadiran sektor informal membantu menghidupkan kehidupan penduduk perkotaan yang tercermin dalam ruang perkotaan di dalam kota. Kegiatan tersebut terjalin secara alamiah dan dipaksa oleh terbatasnya kesempatan lapangan kerja formal yang tersedia dan idealnya tidak dapat disediakan oleh pemerintah. Pasca krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998, sebagian besar pekerja yang di-PHK di sektor formal beralih ke sektor informal untuk bertahan hidup. Ragam kegiatan yang dilakukan oleh sektor informal seperti: penjaja makanan dan minuman membutuhkan tempat di perkotaan. Umumnya, mereka memilih ruang publik terbuka

yang mudah diakses melalui berbagai moda transportasi (yaitu kendaraan dan berjalan kaki). Ini terjadi secara alami tanpa perlu memahami struktur perkotaan dan bentuk kota. Hal tersebut diungkapkan berdasarkan ketersediaan ruang terbuka publik di Medan, yaitu: Lapangan Merdeka, Taman Ahmad Yani, Jalan Haji Misbah (Warkop Harapan), dan lain-lain. Di sini masyarakat membangun ruang informal melalui dinamika kegiatan dan peristiwa sehari-hari yang tidak menentu. Di beberapa tempat, yaitu Jalan Haji Misbah, kegiatan berlangsung selama 24 jam.

Orang tidak pasif; mereka memanipulasi dan mengubah ruang sesuai dengan preferensi mereka. Di sisi lain ruang berpengaruh dan berdampak pada masyarakat [10], seperti yang tergambar dari fenomena pada sebagian besar ruang terbuka publik di Medan. Orang-orang secara aktif mengubah ruang tak terpakai menjadi ruang terpakai. Hubungan spasial antara masyarakat dengan situasi di ruang publik di Medan menunjukkan proses dua arah yang terus menerus antara pedagang kaki lima dan pengunjung yang berpartisipasi secara aktif di ruang terbuka publik tersebut. Ada 'mata' di ruang publik sebagai pemilik alami jalan untuk menangani orang asing dan membuat aset keselamatan.

Namun selama tahun 2018, Pemerintah Kota Medan menertibkan PKL informal karena kehadiran PKL informal tersebut merusak estetika dan ketertiban masyarakat di kota tersebut. Pemerintah Kota Medan berencana menjadikan Medan sebagai kota Bestari (Bestari: bersih, tertata, rapi dan indah). Konsekuensi dari ruang terbuka publik adalah hilangnya aktivitas yang berarti berkurangnya 'mata' di ruang publik tersebut. Beberapa ruang terbuka publik menjadi ruang kosong tanpa aktivitas. Tak ayal, hal itu akan mengurangi rasa aman di ruang terbuka publik bagi penggunaannya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Jacobs, *The Death and Life of Great American Cities*. New York: Random House, 1961.
- [2] O. Newman, *Defensible Space; Crime Prevention Through Urban Design*. New York: Macmillan, 1972.
- [3] A. Coleman, *Utopia on Trial Vision and Reality in Planned Housing*. London: Hilary Shipman, 1985.
- [4] S. E. Merry, "Defensible Space undefended: Social Factors in Crime Control Through Environmental Design," *Urban Aff. Q.*, vol. 16, no. 4, pp. 397–422, 1981, doi: <https://doi.org/10.1177/107808748101600401>.
- [5] J. H. Schweitzer, J. W. Kim, and J. R. Mackin, "The Impact of the Built Environment on Crime and Fear of Crime in Urban Neighborhoods," *J. Urban Technol.*, vol. 6, no. 3, pp. 59–73, 1999, doi: <https://doi.org/10.1080/10630739983588>.
- [6] S. Carr, M. Francis, L. G. Rivlin, and A. M. Stone, *Public Space*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- [7] E. E. Lozano, *Community Design and the Culture of Cities*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- [8] I. Bently, A. Alcock, P. Murrain, S. McGlynn, and G. Smith, *Responsive Environment: A manual for designers*. London: Architectural Press, 1985.
- [9] D. K. Shehayeb and Y. Y. Eid, "Neighbourhood Design and Community Building: A model of social interaction.," in *Proceedings of the First HBNRC & IAPS-CSBE Network Joint Symposium*, 2007, pp. 131–144.
- [10] M. Carmona, S. Tiesdell, T. Health, and T. Oc, *Public Places, Urban Spaces: The dimensions of urban design*. Oxford: Architectural Press, 2003.